



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VI DPR RI**

**BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	: 14 ( <i>empat belas</i> )
Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Wakil Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang.
Hari, Tanggal	: Selasa, 8 Juni 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Mohamad Hekal, M.B.A. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dilanjutkan oleh Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan RKP K/L dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022
Hadir	: 1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Kepala BSN, Kukuh S. Achmad beserta jajaran. 3. Ketua KPPU, Kodrat Wibowo beserta jajaran. 4. Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto beserta jajaran 5. Kepala BPKS Sabang, Iskandar Zulkarnain beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Wakil Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabang pada pukul 10.54 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 8 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor No. AG/03981/DPR RI/ III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Perihal Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Tahun 2022).

## II. KESIMPULAN

### A. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN /Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.677.133.000,- (*Dua Ratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp149.867.260.000,- (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
  - b) Program Standardisasi Nasional sebesar Rp69.809.873.000,- (*Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp34.000.000.000,- (*Tiga Puluh Empat Miliar Rupiah*).

### B. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas No. S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.726.648.000,- (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp83.318.625.000,- (*Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp16.408.023.000,- (*Enam Belas Miliar Rupiah Empat Ratus Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp176.215.151.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).

### C. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan

B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif BP Batam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.273.250.629.000,- (*Dua Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.021.374.848.000,- (*Satu Triliun Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.251.875.781.000,- (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun Anggaran 2022 berupa Rupiah Murni sebesar Rp461.242.371.000,- (*Empat Ratus Enam Puluh Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

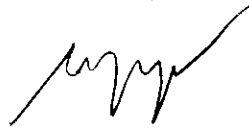
**D. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor: S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021, tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif BPKS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.473.783.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp41.681.770.000,- (*Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
    - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp35.792.013.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- E. Komisi VI DPR RI akan membahas masing-masing program lebih lanjut secara detail dalam Rapat Dengar Pendapat.
- F. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 13.59 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,



GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.

A-327